



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 360/SEK/PW1.1.1/II/2025 Jakarta, 26 Februari 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2026

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.
di tempat

Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu ditetapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas sebagai upaya peningkatan kualitas hasil evaluasi, dan tingkat keberhasilan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kebijakan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

Seluruh satuan kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas, baik yang belum maupun yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM, wajib melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>

Pelaksanaan PMPZI dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari satuan kerja, pengadilan tingkat banding hingga unit Eselon I sesuai kewenangannya. Adapun pelaksanaan PMPZI dan evaluasi Zona Integritas Tahun 2026 secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengisian PMPZI oleh satuan kerja: **Januari s.d. Maret 2026**
- b. Evaluasi dan penilaian berjenjang

Evaluasi dan Penilaian di Pengadilan Tingkat Banding : **1 s.d. 15 April 2026**

Evaluasi dan Penilaian di Unit Eselon I : **15 s.d. 24 April 2026**

- c. Pekan survei ZI Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal **6 s.d. 24 April 2026**
- d. Validasi data hasil survei (digunakan sebagai nilai akhir pada komponen hasil SPAK dan SPKP dalam LKE) tanggal **27 April s.d. 1 Mei 2026**

- e. Penyampaian hasil evaluasi dan penilaian berjenjang oleh masing-masing unit Eselon I ke Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku penanggung jawab Pembangunan Zona Integritas untuk selanjutnya sebagai calon satuan kerja berpredikat WBK/WBBM Tahun 2026 tanggal **4 s.d. 8 Mei 2026**
- f. Penetapan daftar calon satuan kerja berpredikat WBK secara mandiri dan WBBM oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, sebagai dasar penyampaian kepada Kementerian PANRB melalui Portal RB Nasional tanggal **22 Mei 2026**.

2. Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian TPI atas Pengusulan Satuan Kerja berpredikat WBK Secara Mandiri dan WBBM

a. Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian WBBM Tahun 2026

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Evaluasi Internal oleh TPI	11 s.d. 22 Mei 2026
2	Penyampaian kepada Kementerian PANRB melalui Portal RB Nasional	22 s.d. 29 Mei 2026
3	Tahapan evaluasi WBBM	Mengikuti jadwal TPN

b. Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian WBK secara Mandiri Tahun 2026

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pra Evaluasi a. Penyiapan data dukung pengusulan; b. Penginputan ke dalam Portal RB Nasional.	22 s.d. 29 Mei 2026
2	Seleksi Administrasi a. Pelaksanaan Seleksi Administrasi menggunakan Instrumen Seleksi Administrasi (LKE Manual dan data dukung lainnya); b. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi; c. Masa sanggah atas hasil seleksi administrasi; d. Pengumuman hasil sanggah.	1 s.d. 26 Juni 2026
3	Analisis Dokumen a. Pelaksanaan Analisis Dokumen; b. Pengumuman Hasil Analisis Dokumen dan Jadwal Wawancara.	29 Juni s.d. 10 Juli 2026
4	Wawancara (Virtual)	15 s.d. 31 Juli 2026

5	Evaluasi Lapangan (Observasi)	3 Agustus s.d. 25 September 2026
6	Panel Final dan <i>Clearance</i>	Oktober 2026
7	Penyerahan Predikat (<i>Awarding</i> dan LHE)	Desember 2026

3. Kuota Pengajuan Evaluasi Zona Integritas

Mahkamah Agung melaksanakan percepatan reformasi birokrasi pada masa transisi dengan menunjuk satuan kerja yang dapat memberikan dampak atas keberhasilan pembangunan Zona Integritas berdasarkan kelas peradilan, jumlah perkara, kompleksitas perkara, dan jenis layanan. Adapun satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang diwajibkan (*mandatory*) tahun 2026 sebagai berikut:

- Peradilan Umum: Pengadilan Negeri Makassar
- Peradilan Agama: Pengadilan Agama Soreang
- Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selain penunjukan satuan kerja di atas, Mahkamah Agung menetapkan kuota (batasan jumlah) atas pengajuan calon satuan kerja berpredikat WBK mandiri dan WBBM Tahun 2026 yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas evaluasi berjenjang dan menjaga tingkat keberhasilan nasional perolehan predikat WBK mandiri dan WBBM.

a. Kuota Satuan Kerja Diusulkan Meraih Predikat WBK

Uraian	Tingkat Banding/ Kelas IA Khusus/ Kelas IA	Kelas IB/ Kelas II	Jumlah
Lingkungan Peradilan Umum	10	40	50
Lingkungan Peradilan Agama	15	30	45
Lingkungan Peradilan Militer	1		1
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4		4

b. Kuota Satuan Kerja Diusulkan Meraih Predikat WBBM

Uraian	Jumlah
Lingkungan Peradilan Umum	8
Lingkungan Peradilan Agama	10

Lingkungan Peradilan Militer	1
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1

Catatan:

Pembatasan kuota pengusulan dikecualikan bagi satuan kerja Unit Eselon I

4. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) atas satuan kerja berpredikat WBK/WBBM

- a. Tim Penilai Internal Mahkamah Agung melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM;
- b. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi pembangunan Zona Integritas dan konsistensi pemenuhan indikator pasca-perolehan predikat;
- c. Satuan kerja yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dinilai tidak memenuhi kriteria satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, maka dapat diusulkan pencabutan predikatnya oleh TPI.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

